

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2004

Bertentangan dengan Konstitusi

UU Ketenagalistrikan Harus Diamendemen

Jakarta, Sinar Harapan

Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan yang telah disahkan, dinilai bertentangan dengan konstitusi sehingga harus diamendemen. Pasalnya, UU tersebut tidak memberi jaminan keamanan pasokan listrik bagi masyarakat/ konsumen, dan lebih parah lagi UU tersebut tidak mengakomodasi siapa yang bertanggung jawab terhadap pasokan listrik.

Sementara itu, PT PLN (persero) mengakui bahwa masalah perundang-undangan menjadi salah satu kendala bagi investasi swasta di sektor kelistrikan.

Demikian dikemukakan Fabby Tumiwa, Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR) dan Dirut PT PLN (Persero) Eddie Widiono, di Jakarta, Kamis (19/8) pagi.

Menurut Fabby, UU Ketenagalistrikan sudah saatnya untuk diamendemen, mengingat perundang-undangan tersebut memiliki banyak kelemahan. Salah satunya, UU itu tidak memberi keamanan pasokan listrik bagi masyarakat dan harga listrik di masa mendatang akan melambung tinggi.

"Krisis listrik setelah UU tersebut diberlakukan tahun 2002, salah satu dampaknya

adalah terjadinya krisis di wilayah Sumatera yang semakin parah. Sementara itu, akibat pemerintah tidak bisa intervensi dalam penyelesaian krisis tersebut, ini menimbulkan kondisi ketidakpastian di mana sebenarnya tanggung jawab terhadap masalah ketersediaan listrik bagi masyarakat," ujar Fabby.

Investasi Naik

Sementara itu, Eddie Widiono mengungkapkan, sejalan dengan perbalkan ekonomi nasional, minat investasi swasta untuk masuk ke sektor ketenagalistrikan mengalami kenaikan. Dia menyebutkan, beberapa investor telah mengajukan minat. Di antaranya, investor dari India dan Cina yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTGU).

Namun, diakuinya, realisasi dari minat investor tersebut masih terganjal oleh sejumlah permasalahan.

"Kita optimistis bahwa investasi akan meningkat, namun memang investor dalam negosiasi menghendaki kepastian dalam hal penjaminan dan perundang-undangan. Mereka (investor) menanyakan, apakah penjaminan atau investasi mereka dilakukan oleh pemerintah atau tidak dan bagaimana aturan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku di sektor kelistrikan," ujar Eddie.

Ia menambahkan, pemerintah bersama-sama dengan *stake holder* di sektor ketenagalistrikan harus memberi landasan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Investasi tersebut menurutnya sangat krusial untuk mengatasi krisis listrik yang mengancam Indonesia khususnya di wilayah luar Jawa. (rs)